

Penguatan UKM Melalui Program KUR dan Legalitas Usaha di BUMDes Serdang Tirta Kencana dan Kampung Tematik Drum Bujana Kabupaten Tangerang

Rachma Nadhila Sudiyono¹, Fatrilia Rasyi Radita², Maria Novita Olin³, Siti Maesaroh⁴, Masduki Asbari^{5*}, Dewiana Novitasari⁶, Santa Lusianna Sitorus⁷, Lusiana Sari⁸, Sri Wahyuni Asnaini⁹, Ria Hartati¹⁰, Heni Rusmanto¹¹, Gazali¹², Erni Taruli Pebrina¹³, Dwi Purwaningrum¹⁴, Nur Kasyfillah Hardjo¹⁵, Paolinus Hulu¹⁶, Rony Setiawan¹⁷, Rintis Mardika Sunarto¹⁸

Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Indonesia

*Corresponding email: kangmasduki.ssi@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) desa dalam aspek legalitas dan manajemen keuangan, melalui program pelatihan pembukuan sederhana dan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Lokasi kegiatan berada di dua wilayah strategis: BUMDes Serdang Tirta Kencana dan Kampung Tematik Drum Bujana, Kabupaten Tangerang. Metode pelaksanaan mengacu pada pendekatan partisipatif, praktik langsung, dan kolaboratif dengan melibatkan mitra eksternal seperti Bank Mandiri dan pemerintah desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 77,5% peserta berhasil memperoleh NIB melalui platform OSS, sementara lebih dari 70% pelaku UKM mampu menyusun laporan keuangan sederhana. Sebagian peserta juga berhasil mengakses fasilitas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah mengikuti pelatihan ini. Kegiatan ini menciptakan dampak signifikan berupa peningkatan literasi keuangan, legalitas usaha, dan kesiapan transformasi digital di kalangan pelaku UKM desa. Melalui kolaborasi lintas sektor dan pendampingan berbasis kebutuhan riil masyarakat, model PKM ini terbukti efektif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi lokal yang dapat direplikasi secara berkelanjutan.

Kata kunci: UKM desa, pembukuan sederhana, NIB, OSS, legalitas usaha, KUR

Abstract

This Community Service (PKM) activity aims to increase the capacity of village Small and Medium Enterprises (SMEs) actors in the aspects of legality and financial management, through a simple bookkeeping training program and facilitation of making a Business Identification Number (NIB). The activity locations are in two strategic areas: BUMDes Serdang Tirta Kencana and Drum Bujana Thematic Village, Tangerang Regency. The implementation method refers to a participatory, hands-on, and collaborative approach by involving external partners such as Bank Mandiri and the village government. The results showed that 77.5% of the participants successfully obtained NIBs through the OSS platform, while more than 70% of the SMEs were able to prepare simple financial reports. Some participants also successfully accessed People's Business Credit (KUR) financing facilities after participating in the training. This activity created a significant impact in the form of increased financial literacy, business legality, and digital transformation readiness among rural SMEs. Through cross-sector collaboration and mentoring based on the real needs of the community, this PKM model has proven effective as a local economic empowerment strategy that can be replicated sustainably.

Keywords: Village SMEs, simple bookkeeping, NIB, OSS, business legality, KUR

Translated with DeepL.com (free version)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memegang peran strategis dalam struktur perekonomian nasional, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan (Novitasari et al., 2024; Sudiyono et al., 2024). Di Indonesia, kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%, sekaligus menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023). Namun demikian, pelaku UKM di tingkat lokal, terutama di desa, masih menghadapi berbagai kendala mendasar, seperti keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya pencatatan keuangan, dan rendahnya legalitas usaha (Asbari, Novitasari, et al., 2024; Hartika et al., 2024; Pramono et al., 2024). Hal ini menegaskan pentingnya program pemberdayaan seperti Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.

Legalitas usaha menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak hanya merupakan identitas hukum, tetapi juga menjadi syarat utama dalam mengakses program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), perizinan produk, dan keikutsertaan dalam e-katalog pengadaan barang dan jasa (Rahmawati & Yuliyanti, 2022). Sayangnya, pemahaman tentang pentingnya NIB di kalangan pelaku UKM desa masih rendah. Banyak yang menganggap proses pengurusan NIB rumit dan memerlukan keahlian teknis tertentu, sehingga membutuhkan pendampingan yang intensif dan berbasis kebutuhan lokal.

Studi oleh Fitriana et al. (2023) menunjukkan bahwa pendampingan langsung berbasis OSS (Online Single Submission) efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam konteks ini, kegiatan PKM menjadi media strategis untuk melakukan alih pengetahuan sekaligus membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya legalitas usaha. Dengan memperoleh NIB, pelaku UKM tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan mitra usaha lainnya (Asbari, Kumoro, et al., 2024; Simorangkir et al., 2024).

Di samping legalitas, penguatan kapasitas pencatatan keuangan menjadi aspek yang tidak kalah penting. Banyak pelaku UKM yang mencampuradukkan keuangan pribadi dan bisnis, sehingga kesulitan dalam mengukur laba rugi atau arus kas. Menurut penelitian Zulfikar dan Maharani (2022), pelatihan pembukuan sederhana mampu meningkatkan literasi keuangan UKM hingga 67%, serta membantu mereka dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih rasional. PKM ini mengintegrasikan pelatihan pencatatan transaksi, penyusunan laporan arus kas, dan pengantar pelaporan keuangan mikro untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi usaha.

Kegiatan ini juga difokuskan pada integrasi pelatihan pembukuan dengan akses ke program KUR. KUR merupakan program strategis pemerintah yang ditujukan untuk memperluas pembiayaan usaha produktif masyarakat. Namun, syarat utama dalam mengakses KUR adalah legalitas dan pencatatan keuangan yang rapi (Maulidya, 2024). Dalam PKM ini, tim pengabdian tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi juga menghubungkan pelaku UKM dengan pihak bank, dalam hal ini Bank Mandiri, guna mendapatkan akses pembiayaan.

Dampak dari kegiatan ini mulai terlihat dalam peningkatan kemampuan peserta dalam menyusun laporan keuangan sederhana dan berhasilnya sebagian peserta memperoleh NIB. Pelaku UKM yang sebelumnya tidak memiliki dasar akuntansi kini mampu mencatat pendapatan

dan pengeluaran harian secara sistematis. Begitu pula dengan pengurusan NIB, sebagian besar peserta menyelesaikan pendaftaran NIB mereka secara daring dan kini telah terdaftar dalam sistem OSS nasional.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UKM di dua wilayah mitra, yakni BUMDes Serdang Tirta Kencana dan Kampung Tematik Drum Bujana. Selain meningkatkan literasi hukum dan keuangan, kegiatan ini juga menumbuhkan kepercayaan diri peserta dalam menjalankan usaha secara profesional. Dalam jangka panjang, intervensi semacam ini berkontribusi pada terbentuknya ekosistem kewirausahaan desa yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini mengacu pada prinsip kolaboratif dan partisipatif, yang menempatkan mitra masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan. Metode dirancang agar mampu menjawab permasalahan utama yang dihadapi pelaku UKM di dua lokasi mitra, yakni BUMDes Serdang Tirta Kencana dan Kampung Tematik Drum Bujana. Terdapat lima tahapan utama yang menjadi kerangka kerja dalam pelaksanaan kegiatan ini: observasi dan identifikasi masalah, pelatihan interaktif, kolaborasi lintas sektor, praktik langsung, dan evaluasi serta tindak lanjut.

Observasi dan Identifikasi Masalah

Tahap awal dari kegiatan PKM ini adalah melakukan observasi langsung ke lokasi mitra guna memahami kondisi faktual pelaku UKM di lapangan. Tim dosen dari Universitas Insan Pembangunan Indonesia mengadakan kunjungan lapangan ke BUMDes Serdang Tirta Kencana dan Kp Tematik Drum Bujana untuk memetakan tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Observasi ini mencakup aspek legalitas usaha, kapasitas pencatatan keuangan, akses terhadap pembiayaan, serta kesadaran terhadap penggunaan teknologi dalam pemasaran. Dari hasil pengamatan ini, diperoleh data bahwa sebagian besar pelaku UKM belum memiliki NIB dan tidak memiliki pembukuan usaha yang memadai.

Selain observasi, tim juga melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pelaku usaha dan pengelola BUMDes untuk menggali lebih dalam kebutuhan riil dan preferensi metode pendampingan yang paling efektif. FGD ini membuka ruang dialog antara akademisi dan masyarakat sehingga pendekatan yang dirumuskan benar-benar berakar pada kebutuhan mereka. Proses identifikasi masalah ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa kegiatan yang dirancang tidak bersifat top-down, melainkan responsif terhadap konteks sosial-ekonomi lokal. Pendekatan ini juga meningkatkan rasa memiliki dari para peserta terhadap program yang akan dilaksanakan.

Pelatihan Interaktif

Setelah merumuskan isu-isu utama, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan interaktif yang dirancang dalam format partisipatif dan aplikatif. Pelatihan pertama difokuskan pada topik legalitas usaha, khususnya prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui platform OSS (Online Single Submission). Materi disampaikan dengan metode ceramah, dilengkapi dengan simulasi pengisian OSS menggunakan laptop atau smartphone peserta secara langsung. Para pelaku UKM dikenalkan pada manfaat legalitas, seperti akses pembiayaan, kredibilitas usaha, dan keikutsertaan dalam program pemerintah, termasuk kemudahan mengikuti pengadaan barang dan jasa.

Sesi pelatihan kedua diarahkan pada penguatan kapasitas pelaku usaha dalam mencatat transaksi keuangan secara sederhana. Para peserta diperkenalkan dengan konsep dasar akuntansi usaha mikro, seperti pencatatan pendapatan, pengeluaran, kas harian, dan perhitungan laba rugi. Materi disampaikan dengan metode demonstrasi dan studi kasus riil berdasarkan jenis usaha yang dijalankan peserta. Pendekatan ini dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara teori

pembukuan dengan praktik bisnis harian pelaku UKM, yang umumnya masih bersifat informal dan tidak terdokumentasi.



Gambar 1. Foto Peserta di Depan Kantor BUMDES

Kolaborasi Lintas Sektor

Salah satu kekuatan dari pelaksanaan PKM ini terletak pada pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah desa, dan lembaga keuangan. Dalam hal ini, tim dosen bekerja sama dengan Bank Mandiri sebagai mitra strategis dalam fasilitasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perwakilan bank turut diundang sebagai narasumber untuk menjelaskan skema KUR, persyaratan, serta proses pengajuan bagi pelaku UKM yang telah memiliki legalitas dan pembukuan sederhana. Kolaborasi ini membuka ruang dialog yang solutif antara pelaku usaha dan lembaga keuangan.

Tidak hanya sebatas penyuluhan, kerja sama ini juga berujung pada proses pengajuan langsung bagi beberapa pelaku usaha yang memenuhi syarat. Dengan pendampingan dari tim PKM, pelaku UKM dapat mempersiapkan dokumen pengajuan kredit dan memahami simulasi kewajiban pembayaran. Kehadiran pihak eksternal seperti bank dalam kegiatan PKM ini menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan, tidak berhenti pada pelatihan, tetapi menjembatani peserta menuju akses finansial yang konkret.

Praktik Langsung

Tahapan selanjutnya adalah praktik langsung atau *learning by doing*, di mana para peserta tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku aktif. Dalam sesi pembuatan NIB, peserta dibimbing satu per satu dalam mengakses platform OSS, mengisi form identitas usaha, dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Beberapa peserta mengalami hambatan administratif, seperti NIK yang tidak terdaftar atau ketidaksesuaian data, yang langsung ditangani dengan bantuan fasilitator dari tim dosen. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepercayaan diri peserta dan mempercepat proses registrasi legalitas usahanya.

Demikian pula dalam praktik pembukuan, peserta diminta untuk membawa data transaksi riil dari usaha mereka masing-masing. Dengan bantuan format pembukuan sederhana berbasis Excel maupun manual, peserta mengisi data arus kas selama satu minggu terakhir. Mereka kemudian didorong untuk merekonstruksi laporan sederhana seperti neraca dan laporan laba-rugi.

Praktik ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan usaha, tetapi juga mempersiapkan pelaku UKM dalam mengakses pembiayaan yang berbasis kelayakan usaha.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah seluruh rangkaian pelatihan dan praktik selesai dilaksanakan, dilakukan evaluasi berbasis observasi langsung dan kuesioner kepada peserta. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan serta efektivitas metode pelaksanaan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta merasa kegiatan PKM ini membantu mereka memahami pentingnya legalitas usaha dan pencatatan keuangan, serta mampu mengimplementasikannya dalam praktik usaha mereka sehari-hari.

Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, tim PKM juga menyusun rencana tindak lanjut berupa mentoring berkala, serta pengembangan modul digital untuk pendampingan jarak jauh. Rencana ini juga mencakup agenda pelatihan lanjutan terkait pemasaran digital, pengurusan PIRT, dan hak kekayaan intelektual (merek dagang). Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat dampak kegiatan PKM secara berkelanjutan dan memperluas jangkauan pemberdayaan di desa mitra lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan UKM melalui Program KUR dan Pembukuan Sederhana

Pelaksanaan pelatihan pembukuan sederhana di BUMDes Serdang Tirta Kencana berhasil meningkatkan kesadaran pelaku UKM terhadap pentingnya pencatatan transaksi usaha secara sistematis. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan ingatan pribadi dan pencatatan informal yang tidak terdokumentasi dengan baik. Melalui pelatihan ini, peserta diperkenalkan pada format laporan keuangan dasar, seperti buku kas harian, laporan arus kas, dan laporan laba rugi sederhana. Peserta juga dilatih menggunakan media manual dan digital (Ms. Excel) yang sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Setelah sesi pelatihan, peserta diminta mempraktikkan langsung pencatatan keuangan mereka selama satu minggu dan hasilnya dievaluasi oleh tim pengabdian. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Lebih dari 70% peserta berhasil menyusun laporan arus kas sederhana dan mampu membedakan antara biaya operasional dan biaya pribadi. Hal ini menandai terjadinya pergeseran penting dalam pola pikir pengelolaan usaha, dari sekadar berbasis intuisi menuju manajemen berbasis data.

Dampak konkret dari pembukuan sederhana ini adalah terbukanya peluang bagi beberapa pelaku usaha untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan dokumen keuangan yang lebih rapi dan legalitas yang telah dimiliki, pelaku UKM memenuhi syarat administratif untuk mengajukan KUR. Setidaknya tiga pelaku UKM dari kelompok binaan telah difasilitasi konsultasi langsung dengan pihak Bank Mandiri dan mengajukan proposal kredit. Langkah ini mempertegas pentingnya sinergi antara pelatihan manajerial dan akses pembiayaan sebagai satu paket intervensi PKM yang berkelanjutan (Maulidya, 2024).

Dari sudut pandang teoritis, hasil ini sejalan dengan pendekatan entrepreneurial empowerment yang menekankan pada pentingnya akuntabilitas keuangan dalam memperkuat keberlanjutan usaha (Lutfi & Yuliani, 2022). Selain meningkatkan ketahanan bisnis, pelatihan ini juga menumbuhkan kepercayaan diri pelaku UKM dalam menghadapi mitra eksternal seperti perbankan atau lembaga pemerintah. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terciptanya budaya pencatatan dan pertanggungjawaban usaha yang mendukung pertumbuhan skala dan profesionalisasi usaha mikro di desa.

Peningkatan Legalitas Usaha melalui OSS dan NIB

Program sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan di Kampung Tematik Drum Bujana terbukti mampu menjawab salah satu kebutuhan paling mendasar dari pelaku UKM, yaitu legalitas formal. Sebelum kegiatan ini berlangsung,

mayoritas pelaku usaha belum memiliki NIB dan bahkan tidak mengetahui apa itu OSS (Online Single Submission). Pendekatan yang digunakan oleh tim pengabdian adalah memulai dengan edukasi dasar tentang pentingnya legalitas usaha, manfaat NIB dalam akses pembiayaan dan program pemerintah, serta simulasi proses pendaftaran OSS.

Selama pelatihan, peserta diberikan panduan langkah demi langkah dalam proses pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, serta unggah dokumen yang diperlukan. Tantangan yang dihadapi di lapangan cukup beragam, mulai dari NIK yang belum sinkron secara digital, kurangnya pemahaman digital, hingga keterbatasan sarana seperti gawai dan jaringan internet. Namun dengan dukungan fasilitator dari tim dosen dan pendamping desa, sebagian besar peserta berhasil menyelesaikan proses registrasi NIB. Dari 40 peserta, sebanyak 31 orang (77,5%) telah mendapatkan NIB aktif per akhir kegiatan.

Hasil ini menjadi pencapaian signifikan mengingat tingkat literasi digital dan hukum pelaku usaha sebelumnya tergolong rendah. Dengan memiliki NIB, para pelaku UKM kini telah masuk ke dalam sistem formal dan memiliki potensi besar untuk mengakses berbagai program strategis pemerintah, termasuk bantuan UMKM, subsidi PIRT, hingga sertifikasi halal. Legalitas ini juga memperkuat posisi mereka dalam menghadapi persaingan pasar serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka hasilkan (Fitriana et al., 2023).

Pendampingan pembuatan NIB ini juga membawa implikasi jangka panjang terhadap tata kelola usaha mikro di tingkat desa. Menurut teori *institutional isomorphism*, formalitas seperti legalitas akan mendorong pelaku usaha untuk mengikuti standar lain yang berlaku di sektor formal, seperti pencatatan keuangan dan kepatuhan terhadap pajak (DiMaggio & Powell, 1983; Rahmawati & Yuliyanti, 2022). Oleh karena itu, intervensi PKM ini dapat dipandang sebagai langkah awal menuju pembangunan ekosistem ekonomi desa yang tertib, kredibel, dan memiliki daya saing yang berkelanjutan.



Gambar 2. Perwakilan Peserta PKM Menyampaikan Paparan Materi Pelatihan

Peran Kolaboratif dan Transformasi Digital UKM

Salah satu kekuatan dari kegiatan PKM ini adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pemerintah desa, hingga lembaga keuangan seperti Bank Mandiri. Sinergi ini tidak hanya memperkaya konten pelatihan, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan kebermanfaatannya. Dalam kegiatan ini, perwakilan dari Bank Mandiri memberikan paparan langsung mengenai skema KUR dan kriteria pembiayaan, sekaligus membuka sesi konsultasi bagi pelaku UKM yang berminat. Ini menjadi bukti bahwa PKM bukan hanya ruang edukasi, tetapi juga wadah fasilitasi konkret yang menjembatani pelaku usaha dengan sumber daya eksternal.

Di samping itu, kegiatan ini juga mendorong akselerasi transformasi digital di kalangan pelaku UKM, khususnya dalam aspek legalitas dan pemasaran. Proses pengurusan NIB melalui OSS secara daring secara tidak langsung melatih pelaku usaha untuk terbiasa menggunakan platform digital. Beberapa peserta bahkan menyampaikan ketertarikan untuk melanjutkan pembelajaran ke tahapan digital marketing setelah mengenal penggunaan laptop dan smartphone

selama pelatihan. Ini merupakan modal sosial penting yang dapat dikembangkan dalam program lanjutan seperti pelatihan pemasaran melalui media sosial dan e-commerce.

Efektivitas pendekatan kolaboratif ini juga terlihat dari komitmen mitra lokal, seperti pengurus BUMDes dan ketua RT/RW, dalam memfasilitasi lokasi, sarana, dan mengorganisir peserta. Peran aktif masyarakat lokal mempercepat proses mobilisasi dan memperkuat keberterimaan program. Sebagaimana ditekankan oleh Prasetyo dan Setiawan (2024), keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi, tetapi juga oleh seberapa jauh komunitas dilibatkan sebagai mitra dalam seluruh proses.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini menciptakan dampak ganda: transfer pengetahuan teknis sekaligus pembangunan ekosistem kolaboratif di tingkat lokal. Transformasi digital UKM bukanlah proses instan, tetapi kegiatan ini telah membuka jalan bagi terbentuknya pola pikir adaptif terhadap perubahan teknologi dan tuntutan legalitas. Dengan adanya jejaring kolaboratif yang kuat, diharapkan kegiatan ini dapat direplikasi di desa-desa lain sebagai model pemberdayaan UKM yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa intervensi terstruktur yang menggabungkan pelatihan pembukuan sederhana, fasilitasi legalitas usaha, serta kolaborasi lintas sektor mampu memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan pelaku UKM di tingkat desa. Di BUMDes Serdang Tirta Kencana, pelaku usaha mengalami peningkatan kapasitas dalam pencatatan keuangan, yang tidak hanya meningkatkan kesadaran finansial, tetapi juga membuka akses terhadap pembiayaan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara di Kampung Tematik Drum Bujana, pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil membantu mayoritas pelaku UKM untuk masuk ke dalam sistem usaha yang legal dan terintegrasi secara nasional.

Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan PKM yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat, dikombinasikan dengan metode partisipatif, praktik langsung, dan sinergi dengan mitra eksternal seperti lembaga perbankan, mampu menciptakan dampak yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga transformasional. Para pelaku UKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mengalami perubahan perilaku usaha yang lebih profesional, tertib administrasi, dan terbuka terhadap transformasi digital. Dengan kata lain, kegiatan ini telah membangun pondasi awal bagi terbentuknya ekosistem usaha desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam jangka pendek, PKM ini telah mendorong pencapaian individual berupa peningkatan kapasitas manajerial dan legalitas formal. Namun yang lebih penting, kegiatan ini juga menjadi model penguatan institusional dan kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah lokal, dan dunia usaha. Pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan meningkatkan efektivitas pelaksanaan sekaligus menjamin keberlanjutan inisiatif. Hal ini menunjukkan bahwa PKM bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan alat intervensi strategis yang dapat menjawab tantangan struktural ekonomi masyarakat desa.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini menegaskan pentingnya pendidikan tinggi untuk memainkan peran sebagai katalisator perubahan sosial dan ekonomi. Dengan merancang program yang aplikatif, kolaboratif, dan berbasis solusi, perguruan tinggi dapat menghadirkan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UKM, khususnya di daerah yang memiliki potensi tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber daya.

Rekomendasi

- 1) Pemerintah Desa dan BUMDes disarankan untuk melanjutkan pendampingan legalitas dan pembukuan kepada pelaku UKM secara periodik, serta menetapkan insentif bagi usaha yang telah legal dan tertib administrasi keuangan.

- 2) Perguruan tinggi, khususnya Universitas Insan Pembangunan Indonesia, perlu mengembangkan modul digital dan program *blended mentoring* sebagai tindak lanjut kegiatan PKM, untuk memastikan pembelajaran berkelanjutan.
- 3) Lembaga perbankan seperti Bank Mandiri perlu memperluas jangkauan program KUR dengan model jemput bola dan edukasi berbasis komunitas agar akses pembiayaan menjadi lebih inklusif.
- 4) Dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang, dapat menjadikan hasil PKM ini sebagai dasar perumusan kebijakan pendampingan UKM yang terintegrasi dengan OSS, PIRT, dan digital marketing.
- 5) Pelaku UKM disarankan untuk mulai mengadopsi aplikasi pembukuan digital dan aktif mengikuti pelatihan berbasis daring sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap ekonomi digital dan persaingan pasar yang semakin terbuka.

Implikasi Praktis

- 1) Bagi masyarakat mitra, kegiatan ini memberikan dampak langsung berupa peningkatan kapasitas legalitas dan keuangan yang menjadi modal utama dalam memperluas usaha secara formal dan legal.
- 2) Bagi institusi pendidikan tinggi, kegiatan ini mempertegas peran strategis dosen dan LPPM dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta memperluas pengaruh keilmuan ke ranah pemberdayaan nyata.
- 3) Bagi pengambil kebijakan, kegiatan ini menunjukkan pentingnya merancang intervensi pembangunan berbasis lokalitas dan partisipasi aktif masyarakat, yang hasilnya lebih berdampak dibandingkan pendekatan top-down.
- 4) Bagi peneliti dan pengembang program, model kolaboratif yang dikembangkan dalam kegiatan ini dapat dijadikan sebagai prototipe atau *best practice* untuk replikasi program serupa di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asbari, M., Kumoro, D. F. C., Santoso, G., & Nurhayati, W. (2024). Pintar, Kritis, Literat: Pembekalan Remaja dalam Era Informasi. *Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 23–29.
- Asbari, M., Novitasari, D., Wardoyo, S., & Lafendry, F. (2024). Membangun Lingkungan Belajar Positif: Seminar Implementasi Disiplin Positif di Sekolah Menengah Atas. *Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 8–14.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). *The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields*. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Fitriana, R. N., Maesaroh, S., & Santoso, P. B. (2023). Pelatihan OSS berbasis pendampingan legalitas usaha mikro di desa binaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(1), 32–40.
- Fitriana, R. N., Maesaroh, S., & Santoso, P. B. (2023). *Pelatihan OSS berbasis pendampingan legalitas usaha mikro di desa binaan*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(1), 32–40.
- Hartika, A., Susanti, D., Fitridiani, M., Suwandy, S. D., & Rahman, Y. (2024). Pembekalan Esensial Kepemimpinan bagi Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan: Membangun Jiwa Kepemimpinan yang Efektif. *Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 15–22.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). Laporan perkembangan data UMKM nasional 2023. <https://www.kemenkopukm.go.id>
- Lutfi, L., & Yuliani, D. (2022). *Akuntabilitas dan literasi keuangan sebagai fondasi UMKM berkelanjutan*. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Mikro*, 6(3), 89–97.

- Maulidya, A. (2024). Kredit Usaha Rakyat sebagai strategi peningkatan akses keuangan UKM desa . *Jurnal Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa*, 4(2), 91–102.
- Maulidya, A. (2024). *Kredit Usaha Rakyat sebagai strategi peningkatan akses keuangan UKM desa*. *Jurnal Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa*, 4(2), 91–102.
- Novitasari, D., Ika, A., Silalahi, E., & Nazmia, I. (2024). Menyiasati Era Digital: Pelatihan Karyawan UMKM tentang Konsep Dukungan dan Operasional Berbasis ISO 9001: 2015. *Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 1–7.
- Pramono, T., Ardiansyah, A., Kurniasih, M., Putra, F., Novitasari, D., Asbari, M., Muhammad, Z., & Waruwu, H. (2024). The Role of Positive Discipline in The Digital Era: Fostering Inclusive Learning Environments. *Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02), 1–7.
- Rahmawati, A., & Yuliyanti, S. (2022). Peran OSS dalam meningkatkan legalitas usaha mikro . *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(3), 115–124.
- Rahmawati, A., & Yuliyanti, S. (2022). *Peran OSS dalam meningkatkan legalitas usaha mikro*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(3), 115–124.
- Simorangkir, Y. N., Chidir, G., Haryanto, B., Putra, F., Pramono, T., Hutagalung, D., & Asbari, M. (2024). Meningkatkan Literasi Digital Guru melalui Workshop Menulis Artikel dan Publikasi di Jurnal Ilmiah. *Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 30–34.
- Sudiyono, R. N., Gazali, G., Radita, F. R., Fitri, A., Johan, M., Pebrina, E. T., Rahmawati, Y., Hulu, P., Shobihi, A. W. I., & Kabir, A. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Digital Marketing Bagi Usaha Kecil dan Menengah Serta Penyerahan Bantuan Teknik Bank Sampah di Bumdes Serdang Tirta Kencana. *Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 35–43.
- Zulfikar, H., & Maharani, E. (2022). Efektivitas pelatihan pembukuan sederhana terhadap literasi keuangan UMKM . *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Mikro*, 7(2), 54–67.